AKANKAH PRESIDENSI G20 INDONESIA MENJADI *MILESTONE* PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN YANG BERKELANJUTAN?

WILL G20 PRESIDENCY OF INDONESIA BECOME A ROAD MAP MILESTONE FOR SUSTAINABLE RURAL ECONOMY DEVELOPMENT?

Siti Khoeriyah

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ABSTRAK

Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 membuka peluang yang cukup luas bagi Indonesia untuk membawa isu strategis kedalam agenda – agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara – negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perekonomian dan keuangan dunia, karena secara kolektif mewakili sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% *Product Domestic Bruto* (PDB) global, serta 80% investasi global. Agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional, sehingga euforia Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi trend melainkan dalam implementasi mampu menjangkau satuan terkecil dari pewilayahan di Indonesia. Berdasarkan fenomena ekonomi konsep pembangunan diharapkan bisa membawa *trickle down effect* kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan seringkali justru bertolak belakang dari harapan tersebut. Pembangunan ekonomi diwilayah perdesaan menimbulkan efek pengurasan bagi wilayah perdesaan itu sendiri. Sejauh mana peran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi pembangunan perekonomian perdesaan yang berkelanjutan melalui penyelarasan pilar – pilar presidensi G20 Indonesia menjadi peta jalan dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi desa, sehingga momentum Presidensi G20 Indonesia benar – benar membawa manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah perdesaan.

Kata Kunci: G20, presidensi, SDG's, desa, ekonomi, PDB, strategi, berkelanjutan

ABSTRACT

The election of Indonesia as the G20 Presidency 2022 opens up wide opportunities for Indonesia to bring strategic issues into priority agendas that reflect the interest of developing countries and inline with national interest. The existence of the G20 is becoming increasingly strategic and very influential on world economic and financial governance, because collectively it represents around 2/3 population on the world, 75% of global trade, and at least 85% of global Gross Domestic Product (GDP), and also 80% of global investment. The priority agenda in the G20 Presidency of Indonesia which is in line with the Sustainable Development Goals (SDG;s) is wished to be a navigator for the direction of policy making on a national scale, so that the euphoria of the Indonesian G20 Presidency is not only a trend but in its implementation it is able to reach the smallest regional units in Indonesia.Base on the economic phenomenon, the concept of development is expected to bring a trickle down effect to the wider

community. However in practice, economic development in rural areas often contradicts these expectations. Economic development in rural areas create a backwash effect for the rural areas themselves. How far the role of Presidency G20 Indonesia in 2022 is extend for sustainable rural economic development through aligning the pillars of the Indonesian G20 Presidency to become a road map in determining rural economic strategies and policies, so that the momentum of Indonesia's G20 Presidency really brings benefit to the economic development of rural areas.

Keywords: *G20, presidency, SDG's, rural, economic, GDP, strategy, sustainable*

A. Pendahuluan

Perbincangan ekonomi global menjadi hal yang tidak pernah surut, terlebih pemerintah setiap negara selalu berusaha melakukan berbagai strategi untuk memajukan ekonomi nasional mereka. Berbagai kerjasama internasional mulai dari bilateral, regional sampai dengan multilateral sebagian besar mengangkat isu yang senada. Namun sejauh mana kerjasama antar negara membawa manfaat bagi anggotanya masih perlu untuk dikaji lebih jauh. Pujayanti (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum internasional. Peran dan manfaat setiap kerjasama antar negara harus benar-benar dapat dirasakan bagi warga negara.

Senada dengan Pujayanti (2015), dalam penelitiannya Putri (2020) menyebutkan bahwa isu–isu permasalahan global dan upaya dalam mengatasinya menjadi salah satu alasan pembentukan forum *Group of Twenty* (G20). Ada banyak studi yang menjelaskan forum G20 diantaranya Astuti (2020) menjelaskan dalam penelitiannya tentang peranan kerjasama G20 terhadap pemulihan ekonomi global dari Covid-19, sementara Putri (2020) membahas peranan G20 sebagai mediator kemajuan ekonomi Indonesia. Secara umum berbagai studi G20 telah banyak membahas isu-isu global maupun nasional, namun studi yang mengaitkan G20 dengan isu kewilayahan seperti desa belum banyak disebutkan, untuk mengetahui lebih jauh tentang peranan G20 terhadap isu kewilayahan terutama desa sebagai satuan entitas terkecil dalam wilayah negara Indonesia dirasa perlu untuk dikaji sehingga dapat membuka pengetahuan dan informasi yang lebih luas terkait isu-isu global, nasional maupun lokal suatu negara.

G20 yang terbentuk tahun 1999 menjadi semakin kuat implikasinya sejak 2008, terlebih ketika forum ini merubah level pertemuannya dari level menteri ke level kepala negara guna menyikapi ekonomi global (Sushanti, 2019). Keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perekonomian dan keuangan dunia, karena secara kolektif mewakili sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% *Product Domestic Bruto* (PDB) global, serta 80% investasi global, dan secara komposisi negara anggota G20 meliputi 11 negara maju dan 9 negara berkembang dengan sebaran negara anggota diantaranya, 4 negara merupakan anggota Uni Eropa dan merupakan anggota G7, 8 negara merupakan anggota APEC, disamping *Chair* ASEAN, dan *Chair Africa Union* dan Chair APEC. G20 juga memiliki anggota negara *permanent guest* yang meliputi Spanyol, Singapura, Norwegia, dan Belanda (Kemendag, 2020).

G20 merupakan *platform* multilateral yang menghubungkan negara – negara maju dan berkembang dengan harapan terdapat pendapat yang merata sehingga

solusi yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan negara – negara maju tetapi menguntungkan semua pihak (Putri, 2020). Tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif antar negara – negara maju dan negara ekonomi berkembang menjadi tujuan inti dari forum G20. Esensi *common goal* yang menjadi landasan vital dari forum ini adalah sebuah aksi kolektif dalam menyikapi problematika ekonomi dunia dengan mengedepankan fleksibilitas. Tata kelola G20 yang beroperasi diluar protokol formal hukum internasional dan sistem multilateral PBB membuat G20 unik sehingga menjadikan G20 sebagai badan informal yang *agile* yang menghubungkan berbagai organisasi internasional untuk menciptakan aturan atau gagasan yang menopang sistem ekonomi global, terutama dalam merespon krisis ekonomi dengan cepat. G20 menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan ekonomi dunia dan forum multilateral seperti *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank.* Melihat begitu besar dan luasnya cakupan kerjasama dan implikasi dari G20, ditambah dengan cakupan isu yang menjadi perhatian forum G20 tidak hanya persoalan ekonomi tetapi juga isu yang menyinggung sosial dan lingkungan, tak aral hal ini memberikan stimulus pada sejumlah negara untuk terlibat aktif dalam forum G20.

Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 sejak *Riyadh Summit* 2020 membuka peluang yang cukup luas bagi Indonesia untuk membawa isu strategis kedalam agenda – agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara – negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Posisi Indonesia dalam forum G20 saat ini secara domestik PDB per kapita tahun 2019 sebesar US$ 4450 dimana pada level ini menyerupai 35% negara di dunia dengan rasio kemiskinan sebesar 9,78% pada tahun 2020. Secara global Indonesia berperan penting sebagai kekuatan ekonomi baru dilevel regional dan global dengan peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) di forum G20, dan secara regional Indonesia menjadi kekuatan pasar baru (*New Establish Emerging Market*) bersama Korea Selatan, Turki, dan Meksiko (Pambudi, 2022).

Terdapat dua hal mendasar yang ingin dicapai oleh Indonesia di forum G20, diantaranya peningkatan standar mutu komoditas sesuai tuntutan pasar internasional, agar mempunyai nilai kompetitif dengan produk-produk sejenis di pasar global dan mendapatkan peluang pemanfaatan akses pasar yang lebih besar melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari sesama anggota G20 (Yulius *et.al*, 2011). Agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional, sehingga euforia Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi trend melainkan dalam implementasi mampu menjangkau satuan terkecil dari pewilayahan di Indonesia. Peluang besar sebagai Presidensi G20 diharapkan pula mampu membuka akses wilayah perdesaan di Indonesia yang selama ini yang masih termarginalkan dalam kancah internasional. Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menegaskan 17 target SDG's telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia.

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar utama yang menjadi fokus Kepresidenan G20 tahun 2022 yakni transformasi ekonomi berbasis digital.

Berdasarkan fenomena ekonomi konsep pembangunan diharapkan bisa membawa *trickle down effect* kepada masyarakat luas baik dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi (Hikmat, 2004). Namun dalam praktiknya pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan seringkali justru bertolak belakang dari harapan tersebut. Pembangunan ekonomi diwilayah perdesaan menimbulkan *backwash effect* (efek pengurasan) bagi wilayah perdesaan itu sendiri. Sumber Daya yang ada di perdesaan sebagai sumber bahan baku terangkut keluar wilayah tanpa memberikan efek ekonomi pada masyarakat perdesaan itu sendiri, ditambah lagi problem sosial yang ditimbulkan dari proses pembangunan, mulai dari kerusakan lingkungan sampai dengan kerentaan sosial dan budaya masyarakat lokal mulai terkikis (Tanjung *et al*, 2018). Sejauh mana peran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi pembangunan perekonomian perdesaan yang berkelanjutan dirasa perlu untuk kaji, sehingga momentum yang tepat dapat membawa kemajuan bagi seluruh bangsa di wilayah tanah air, tak terkecuali masyarakat pada unit entitas terkecil yang disebut desa.

B. Kedudukan Ekonomi Indonesia Pada Forum G20

Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dikancah internasional, posisinya kini disejajarkan dengan negara – negara maju dunia. Ini dibuktian dengan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang manjadi presidensi pertemuan G20 tahun 2022 atas negara – negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia (Kusnandar, 2021).

Gambar 1. PDB 20 Anggota G20 (2020)

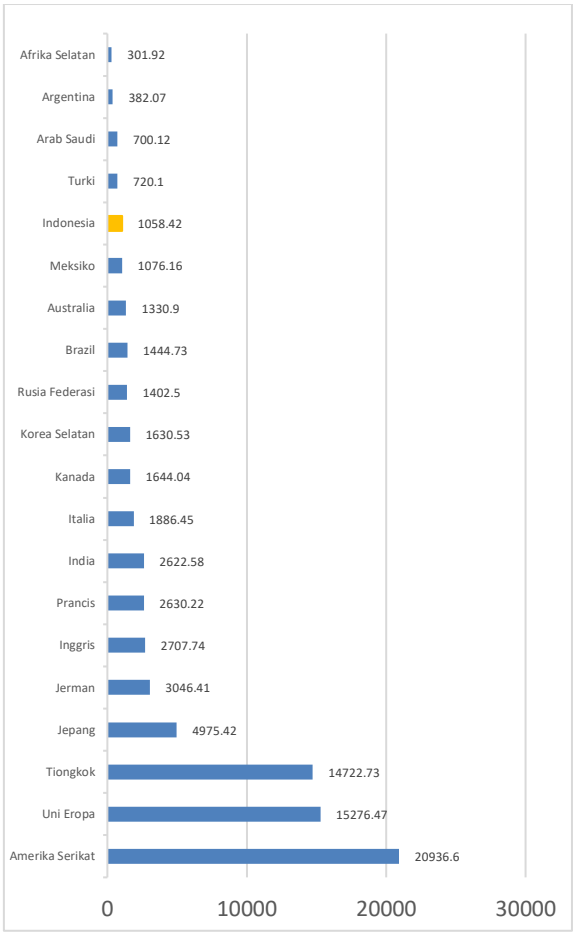

Sumber: Worldbank, 2021

Data Worldbank menyebutkan rata-rata besaran Produk Domestik Bruto (PDB) negara – negara anggota G20 tahun 2020 mencapai U$ 4.068,931 miliar. Amerika Serikat merupakan anggota dengan perekonomian terbesar dengan nilai PDB mencapai U$ 20.936,6 miliar, diikuti oleh oleh Uni Eropa dan Tiongkok pada urutan ke-2 dan ke-3 dengan masing-masing PDB sebesar U$ 15.276,47 miliar untuk Uni Eropa dan U$ 14.722,73 miliar untuk Tiongkok. Sementara Afrika Selatan dengan PDB sebesar U$ 301,92 milar adalah negara anggota G20 dengan nilai PDB terendah. Indonesia dengan PDB sebesar U$ 1.058,42 milar menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 di bawah Meksiko yang menduduki peringkat ke-15 dan berada diatas Turki, Arab Saudi, Argentina, dan Afrika Selatan.

Sementara Pahlevi (2021) menjelaskan bahwa Data *Trading Economic* mencatat negara anggota G20

dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Afrika Selatan yang mencapai angka hingga 34,9% berada di bawah Brasil dengan tingkat pengangguran sebesar 12,6%. Jepang merupakan negara dengan tingkat pengangguran terkecil dibanding negara – negara anggota G20 dengan angka pengangguran sebesar 2,7%. Disusul peringkat 2 negara dengan tingkat pengangguran terkecil lainnya adalah Korea Selatan dimana tingkat pengangguran berada diangka 3,2% dan menempatan Korea Selatan diatas Meksiko yang menduduki peringkat ke 3 dengan tingkat pengangguran 3,9%. Sementara Indonesia berada pada tingkat ke-10 dengan tingkat pengangguran sebesar 6,49% dan menempatkan Indonesia diatas Arab Saudi, Kanada dan India.

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Negara G20

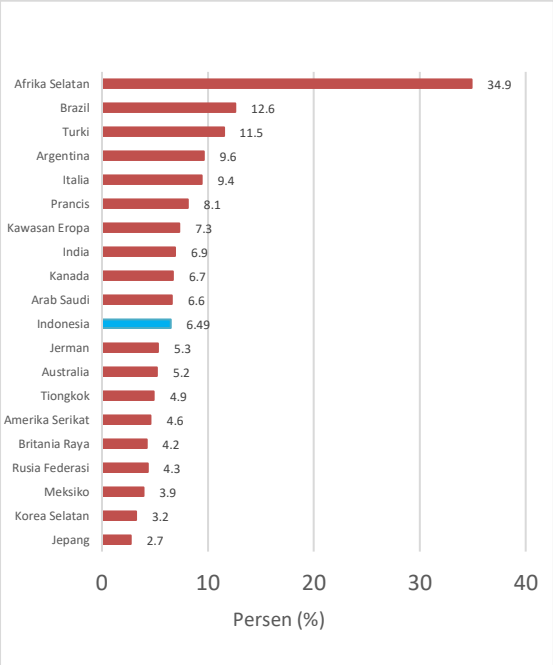

Sumber: Trading Economic, 2021

Secara nasional data BPS menyebutkan PDB Indonesia berdasarkan lapangan usaha pada harga konstan selama 5 tahun terakhir menunjukan angka yang fluktuatif pada kurun waktu 2017-2021. Periode 2017 -2019 PDB nasional tiap kuartal menunjukan kenaikan signifikan. Tahun 2019 nilai PDB kuartal III menunjukan nilai tertinggi dibanding kuartal tahunan selama periode 2017 – 2021, bahkan pada kwartal ini nilai PDB berada jauh diatas rata-rata tahunannya pada kwartal yang sama.

Gambar 3. PDB Nasional 2017 - 2021

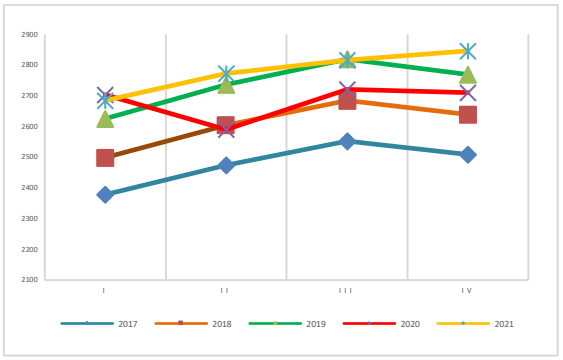

Sumber: BPS, 2021

Sementara pada kuartal II tahun 2020 PDB nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berada pada titik terendah dibanding PDB tahun sebelumnya pada kuartal yang sama, hal ini disebabkan situasi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi nilai PDB nasional. Namun di tahun 2021 nilai PDB nasional kembali mengalami kenaikan seiring dengan mulai terkendalinya wabah Covid-19 di Indonesia.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi agenda besar tidak hanya di dalam negeri tetapi forum G20 secara spesifik mengagendakan pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Setelah 2 tahun pandemi, saat ini sudah mulai memasuki fase *recovery*. Namun pemulihan ini masih dibayang – bayangi ketidakpastian, kesenjangan, dan tabrakan kepentingan baik secara politik maupun ekonomi. Pada fase pemulihan saat ini sebagian sektor pulih, namun sebagian sektor lainnya berada pada fase stagnan atau cenderung menurun (Pambudi, 2022). Beberapa industri pulih diantaranya industri teknologi, industri retail, dan industri software, sementara industri yang butuh bantuan pemulihan diantaranya *travel*, *entertainment*, *hospitality*, dan *food service*.

Fase pemulihan untuk industri terdampak tentunya membutuhkan upaya yang lebih keras, kolaborasi antar bidang dan antar negara melalui kerjasama mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan main topik Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat 3 pilar utama yang meliputi arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi merupakan isu prioritas yang diangkat dalam tema Presidensi 2022 *"Recover Together Recover Stronger"*. Adapun fokus utama transformasi ekonomi berbasis digital yang ingin dicapai adalah terciptanya nilai ekonomi dengan teknologi digital. Lebih jauh Pambudi (2022) menerangkan melalui *Finance track* dan *Sherpa track cross cutting* penegakan pilar – pilar utama presidensi G20 dilakukan melalui digitalisasi ekonomi, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan, pemuda dan disabilitas, pemulihan ekonomi, dan transisi energi (akses terhadap teknologi dan keuangan).

Sejalan dengan hal tersebut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dalam 5 tahun mendatang menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui hal berikut:

a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Secara terperinci sasaran pembangunan pertama dijabarkan dalam target tahun 2024 yang meliputi:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;dan
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan

Sementara sasaran pembangunan kedua dijabarkan secara terperinci ke dalam target tahun 2024 sebagai berikut:

a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi;
b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
c. Peningkatan ekspor bernilai tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Riyanto (2022) menyebutkan, berdasarkan pemetaan potensi koperasi dan UMKM di Indonesia terdapat 127.124 unit koperasi dengan sebaran 89,59% terdapat pada level Kabupaten/Kota, sebaran 6,35% di level provinsi, dan 4,06 % yang terdapat dalam level nasional. Rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,47%, sementara nilai indeks kewirausahaan Indonesia sebesar 26,0 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 75 dari 137 negara berdasarkan *The Global Enterpreneur Development Institute* pada tahun 2020. Program penguatan kewirausahaan dan UMKM pada tahun 2020 telah mampu meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 3%, nilai ini masih dianggap kurang mengingat target pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% dengan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,55% di tahun 2024. Lebih lanjut Riyanto (2022) menerangkan pencapaian sasaran pembangunan melalui UMKM diperlukan *Big Data* dalam membangun kewirausahaan, disamping penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, pembagian peran Kementerian Lembaga, Pemda dan pemangku kepentingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran tersebut.

Peranan UMKM sebagai unit usaha mikro masyarakat tentunya tidak bisa berjalan sendiri, perlu dikukung oleh unit usaha mikro sampai pada level entitas terkecil, sehingga peran dan usaha pada level Desa secara agregat dapat memperkuat dan menyokong ekonomi nasional.

C. Pembangunan Ekonomi Desa – desa di Indonesia

Sebagai lokus pembangunan terkecil, desa memiliki peran strategis. Desa diidentikan sebagai ibu kandung suatu negara yang berarti nuansa kehidupan masyarakat desa mencerminkan gambaran nyata kehidupan masyarakat pada suatu negara (Iskandar, 2019). Data BPS pada bulan Maret 2020 menyebutkan kemiskinan Indonesia sebanyak 26,42 juta orang atau 9,78% dari jumlah tersebut sebanyak 15,26 juta orang atau sebesar 12,82% penduduk miskin ada di desa, dan 11,16 juta orang atau sebesar 7,38% penduduk miskin ada di kota, hal ini menggambarkan secara umum bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih di dominasi oleh wilayah perdesaan. Menjadi sangat ironi ketika desa diharapkan menjadi penyangga ekonomi bagi kota, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan seperti saat kondisi pandemi, peran desa sebagai penyangga ekonomi mutlak dibutuhkan, sehingga desa mampu mengurangi beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari kerja.

Gambar 4. Dana Desa 2015 - 2021

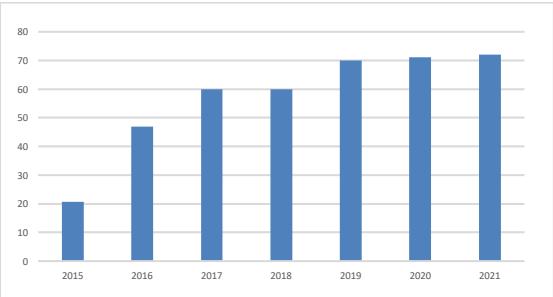

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Strategi transformasi ekonomi desa telah dilakukan oleh pemerintah. Sejak diimplementasikannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai stimulus penyelesaian masalah pembangunan oleh desa sendiri. Sejak awal penyaluran dana desa di tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang dianggarkan terus mengalami kenaikan. Pada Gambar 4 dapat dilihat, dana desa yang telah disalurkan pada tahun 2015 sebesar 20,67 Trilyun, sementara tahun 2016 dana desa yang salurkan mengalami kenaikan sebesar 26,21 Triliun atau naik sebesar 127% dari alokasi tahun 2015. Tahun 2017 dan 2018 penyaluran dana desa masing-masing sebesar 60 Triliun atau naik sebesar 27,71% dari tahun 2016. Tahun 2019 dana desa yang disalurkan mencapai 70 Triliun atau naik sebesar 16,67% dari tahun 2017 dan 2018.

Tahun 2020 dan 2021 dana desa yang disalurkan mencapai lebih dari 70 Triliun per tahun, lebih besar dari pengalokasian dana desa pada tahun – tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar 68 Triliun yang diperuntukan untuk 74.960 desa pada 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Besarnya Dana Desa pada 3 tahun terakhir diharapkan mampu untuk penanganan pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19, sehingga masyarakat yang terdampak masih tetap bisa bertahan dengan program kegiatan yang dialokasikan melalui Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya di atur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) yang bisa menjadi arahan desa dalam penyusunan program dan kegiatan, sehingga Dana Desa yang terkelola dapat benar – benar membawa manfaat dalam memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 menetapkan 3 fokus prioritas yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa dapat

menjadi arahan bagi desa untuk menyusun program dan kegiatan desa di tahun 2022.

Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, penggunaan Dana Desa tahun 2022 juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022. Dikutip dari Perpres nomor 104 tahun 2021, pada pasal 5 ayat 1 penggunaan dana desa tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut:

a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) paling sedikit 8%, dari alokasi dana desa setiap desa; dan
d. Program sektor prioritas lainnya

Dengan demikian dari total 100% dana desa yang diterima oleh setiap desa, pemerintah desa hanya bisa mengalokasikan 32% dari dana desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya.

Lebih rinci Permendesa Nomor 7 tahun 2021 menjelaskan penggunaan Dana Desa tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG's) Desa meliputi:

a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ badan usaha milik Desa bersama (BUMDes Bersama) untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/ BUMDes Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa yang meliputi:

a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera, dan;
e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa:

a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, dan;
c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Secara ringkas arah strategi kebijakan Desa dalam penggunaan Dana Desa ditekankan pada tujuan SDG's/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mendukung tujuan pembangunan nasional dan global. Konsep SDG's menggabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia, sebagai konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama ini (UN, 2015) yang meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya. Iskandar

(2019) menyebutkan SDG's memenuhi kebutuhan detail pembangunan yang lebih riil sesuai kondisi riil di lapangan. SDG's desa merupakan pembangunan total desa, dimana seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan sehingga SDG's Desa mampu berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara terperinci 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SDG's Desa

SDG's Desa	Keterangan
1	Desa Tanpa Kemiskinan
2	Desa Tanpa Kelaparan
3	Desa Sehat dan Sejahtera
4	Pendidikan Desa Berkualitas
5	Keterlibatan Perempuan Desa
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
10	Desa Tanpa Kesenjangan
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
14	Desa Peduli Lingkungan Laut
15	Desa Peduli Lingkungan Darat
16	Desa Damai Berkeadilan
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Sumber: Iskandar, 2019

D. Keselarasan Pembangunan Ekonomi Desa dengan Pilar – pilar Kegiatan Presidensi G20

Kepresidenan G20 berputar setiap tahun diantara para anggotanya. Negara yang memegang kepresidenan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya, hal ini yang dikenal dengan *Troika* untuk memastikan kesinambungan agenda. Saat ini Itali, Indonesia, dan India adalah negara *Troika*. Agenda dan koordinasi kerja diselesaikan oleh perwakilan pemimpin G20 yang dikenal dengan *Sherpa* bersama para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral. Puncak kerja G20 disetiap siklus adalah komunike yang mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan, yang disusun dari rekomendasi yang dipillih dan hasil pertemuan tingkat menteri dan alur kerja lainnya (BI, 2022).

Kerangka kerja Presidensi G20 Indonesia melingkupi 3 pilar utama yang melingkupi arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Masing – masing pilar di fokuskan pada restrukturisasi arsitektur kesehatan global, menciptakan nilai ekonomi dengan teknologi digital, serta mencapai kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi.

Gambar 5. Pilar – pilar Kegiatan Presidensi G20

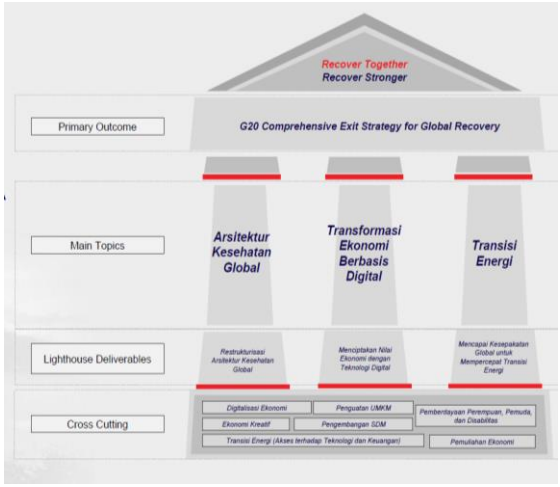

Sumber: Pambudi, 2022

Pambudi (2022) menyebutkan bahwa kebijakan global jalur *Sherpa* yang menjadi strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui transformasi digital dilakukan untuk pemulihan tatanan ekonomi global pasca pandemi menjadi lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan digitaliasi yang meliputi:

a. Menciptakan nilai ekonomi digital melalui pemanfaatan teknologi digital lebih inklusif untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya dalam hal pengembangan UMKM dan inklusi keuangan;
b. Pengembanagn literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan
c. Digitalisasi sektor – sektor yang berkontribusi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat pemulihan ekonomi;
d. Mendorong pemahaman tentang pentingnya tata kelola global

Hasil konkret yang ingin dicapai adalah terciptanya nilai ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Secara spesifik streamlining isu prioritas Sherpa Track dengan prioritas utama pada pilar transformasi ekonomi berbasis digital tergambar pada Gambar 6 dimana masing-masing working group dijabarkan ke dalam agenda kegiatan yang terperinci.

Gambar 6. Spesifik *Streamlining* Pilar Transformasi Ekonomi Berbasis Digital

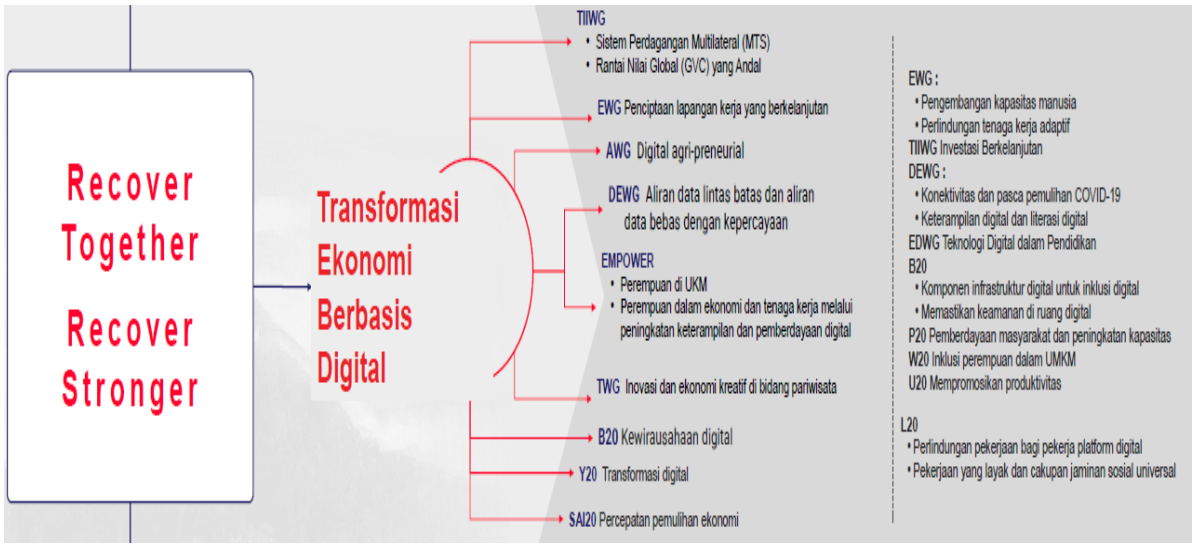

Sumber: Pambudi, 2022

Pilar kegiatan presidensi G20 secara global menjadi acuan arah kebijakan dan strategi yang dapat diselaraskan dan diimplementasikan pada unit entitas terkecil di Indonesia. Adapun keselarasan pilar ekonomi G20 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendesa Nomor 7 Tahun 2022, dan SDG's Desa sebagai berikut:

Tabel 2. Keselarasan Pilar Ekonomi G20 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendesa Nomor 7 Tahun 2022, dan SDG's Desa

Working Group Pilar ekonomi G20	UU 6/2014	Permendesa 7/2022	
TIIWG Investasi berkelanjutan **EWG** Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, Pengembangan kapasitas manusia,Perlindungan kerja adaptif **DEWG** Keterampilan dan literasi digital **EMPOWER** Perempuan di UKM, Perempuan dalam ekonomi dan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan digital **TWG** Inovasi dan ekonomi kreatif **B20** Kewirausahaan digital **Y20** Transformasi digital **W 20** Inklusi perempuan dalam UMKM	**Norma Pembangunan Desa**: Kebersamaan, kekeluargaan, keadilan sosial, pengarusutamaan perdamaian, dan kegotongroyongan **Tujuan Pembangunan Desa**: Penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, kualitas hidup manusia **Metode Pembangunan Desa**: Pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa	SDG's 1,10 16, 17 SDG's 1,2,3,4 SDG's 6,7,8,9, 11,12,13,14,15

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Keterangan:

TIIWG: *Trade, Investment and Industry Working Group*
EWG: *Employment Working Group*
DEWG: *Digital Economic Working Group*
TWG: *Tourism Working Group*
B20: Kelompok Bisnis Anggota G20
Y20: Kelompok Pemuda G20
W20: Kelompok Wanita G20

E. Rekomendasi Kebijakan

Momentum presidensi ini hanya terjadi 1 kali setiap generasi (20 tahun sekali), untuk itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Presidensi G20 ditengah pandemi harus bisa membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi Indonesia terhadap krisis, sehingga kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 menjadi kesempatan Indonesia dikancah internasional dan regional dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi kawasan khususnya dalam pemulihan ekonomi global.

Presidensi G20 Indonesia merupakan peluang bagi negara untuk menggali potensi dalam negeri sampai dengan tingkat level terbawah, sehingga momentum presidensi G20 mampu menjadi *milestone* peta jalan bagi pembangunan ekonomi Indonesia di level desa. Beberapa Strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Pelibatan Pemerintah Daerah sampai dengan level desa dalam persiapan pertemuan presidensi G20 Indonesia.

   Jumlah kegiatan presidensi G20 Indonesia telah ditetapkan sebanyak 184 pertemuan yang terdiri dari 1 Konferensi Tingkat Tinggi, 20 pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, 17 pertemuan tingkat *Sherpa*/ *Deputi*, 56 pertemuan tingkat *working group*, dan 90 pertemuan tingkat *engagement group*, dimana terdapat 25 kota lokasi penyelenggaraan. Pelibatan pemerintah daerah sampai dengan level desa khususnya pada kota–kota penyelenggara pertemuan menjadi hal penting, sehingga wilayah yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan selain lebih siap dalam pelayanan, hal ini akan bernilai positif dalam promosi daerah tidak hanya domestik melainkan juga ke mancanegara. Potensi desa dan sumber daya yang ada bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi wilayah.

b. Penyiapan Sumber Daya Manusia menghadapi digitalisasi ekonomi untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan usaha milik desa.

   Kondisi pandemi telah merubah kebiasaan normal baru, dimana sebagian besar kegiatan manusia beralih dengan teknologi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya di wilayah perdesaan perlu untuk dikembangkan sehingga kemampuan teknologi warga semakin sejajar dengan masyarakat urban dan masyarakat global dalam pemanfaatan teknologi. *Smart Village* menjadi penting searah dengan agenda presidensi G20 dalam peningkatan keterampilan dan literasi digital.

c. Pengembangan ekonomi kreatif dengan menggali potensi lokal desa menjadi jalan terbukanya investasi berkelanjutan.

   Setiap wilayah mempunyai potensi dan keunggulannya masing – masing. Potensi yang dikembangkan menjadi ekonomi kreatif dapat membuka peluang kerjasama dan investasi global. Pengembangan wisata dan industri lokal dengan tetap menjaga kearifan lokal bisa menjadi alternatif pengembangan ekonomi kreatif wilayah perdesaan. Terbukanya ekonomi kreatif secara perlahan akan membuka peluang investasi global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Iskandar. 2019. SDG's Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hermawan P. Yulius, dkk. 2011. *G-20 Research Project: The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role, Objectives of* Indonesia

Membership. Jakarta: *Friedrich-Ebert-Stiftung*

Hikmat, R. Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Tanjung A, Pakkanna M, Bhinadi A. 2018. Arus Baru Ekonomi Indonesia. Jakarta: Flasmediatama

UN.2015.*Transforming Our World:The 2030 Agenda For Sustainaible Development.*New York:UN

Jurnal

Alvela Salsabila Putri, 2020. "G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia". Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIII, No. 1, Januari – Juni 2020.

Aridini Pujayanti, 2015. Kerjasama Selatan Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. Jurnal Politica, Vol 1, No. 6, 15 Maret 2015. Available at: https://jurnal.dpr.go.is/index.php/politica/article/view/300. Diakses pada 15 Juli 2022

Sushanti Sukma. Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang Atau Tren?. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, [S.l.], vol. 1, no. 1, p. 1-14, july 2019. ISSN 2685-4570. https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/50953>. Diakses pada 18 Maret 2022. doi: https://doi.org/10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p01.

Dokumen

Cipto Riyanto. 2022." Program Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Daerah Tertinggal Melalui UMKM" *Presentasi:* Rapat Koordinasi Lintas K/L Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, 29 Maret 2022. Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM.

Edi Prio Pambudi. 2022. "Presidensi G20: Keterkaitan Agenda Kebijakan Nasional dan Upaya Pemulihan Global." *Presentasi: WEBINAR Policy Analyst Public Lecture "Presidensi G20 sebagai Momentum Membangun Agenda Kebijakan Indonesia dalam Meningkakan Pemulihan Berbagai Sektor di Tingkat Global",* Tanggal 24 Maret 2022. Jakarta: Co-Sherpa/Kemenko Perekonomian

Kementerian Perdagangan. 2020. Laporan Akhir "Analisis Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia pada Tahun 2023 di Sektor Perdagangan. Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Badan Pengkajian dan Pengembagan Perdagangan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. 17 Januari 2020. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. 29 November 2021. Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115744A. Jakarta

Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun* 2022. 16 Agustus 2021. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 961. Jakarta

Website

BI. 2022. Presidensi G20 Indoenesia 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 (bi.go.id). Akses 25 Maret 2022

Kementerian Keuangan. 2022. Postur TKDD Nasional. Portal data (kemenkeu.go.id) Akses 16 Juli 2022

Reza Pahlevi.2021. Daftar Tingkat Pengangguran Negara-negara G20, Indonesia Peringkat Berapa? | Databoks (katadata.co.id). Akses 3 September 2021

Viva Budy Kusnandar. 2021. Di G20, Ekonomi Indonesia Urutan Berapa? | Databoks (katadata.co.id). Akses 7 Desember 2021